



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Komenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PENGUMUMAN

NOMOR: KP.01.00/12.20.22/PANSEL-CASN/XII/2022

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 360 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022, kami memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi PPPK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 adalah sebanyak 91 (sembilan puluh satu) formasi, dengan perincian sebagai berikut:

- Formasi dengan kualifikasi lulusan S-1 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) formasi.
- Formasi dengan kualifikasi lulusan D-III sebanyak 13 (tiga belas) formasi.
- Informasi rinci dapat dilihat pada lampiran I.

II. PERSYARATAN

A. Persyaratan umum bagi pelamar PPPK

- Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani:
 - a. Minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah; dan
 - b. Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta/lembaga swadaya non-pemerintah/yayasan;
10. Bersedia ditempatkan di unit kerja manapun di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai PPPK);
12. Berkelakuan baik;
13. Tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
14. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, di Dalam Negeri atau Luar Negeri yang program studinya telah TERAKREDITASI oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat tanggal kelulusan, dengan persyaratan S-1/ Sarjana atau D-III/ Diploma minimal 2,30 (dua koma tiga puluh) dalam skala 4;
15. Untuk lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah luar Negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
16. Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima.

B. Persyaratan Wajib Tambahan

Jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1.

C. Persyaratan Sertifikat Kompetensi Sebagai Tambahan Nilai

1. Jabatan Ahli Pertama – Penerjemah:
 - a. Menyampaikan Hasil tes TOEFL PBT/ITP 2 tahun terakhir dengan skor 570;
 - b. Menyampaikan Hasil tes TOEFL iBT 2 tahun terakhir dengan skor 88 atau;
 - c. Menyampaikan Hasil tes IELTS 2 tahun terakhir dengan skor 6,5.
2. Jabatan Terampil – Pustakawan:

Menyampaikan sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu jenis jalur kebutuhan PPPK, pada satu instansi dan satu formasi jabatan, menggunakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apabila pelamar sudah melamar pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka tidak dapat melamar pada instansi lain;
2. Program studi pelamar terakreditasi pada BAN-PT pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
3. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dengan melampirkan bukti :
 - 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
 - 2) Link (tautan) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar (bagi penyandang disabilitas);
4. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi CASN Kementerian Pemuda dan Olahraga diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut sebagaimana tercantum pada **romawi VII**;
5. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
6. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK diberikan Masa Hubungan Perjanjian Kerja selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
7. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman.

IV. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online, dimulai dari tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

2. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online serta mengunggah (upload) scan dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal berlatar belakang warna merah;
 - b. Surat Lamaran asli berwarna ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga di Jakarta, ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (format surat lamaran dapat diunduh di laman www.kemempora.go.id/rekrutmenpppk);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli berwarna atau Surat Keterangan asli berwarna telah melakukan rekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - d. Asli berwarna ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang telah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Asli Transkrip nilai atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin asli berwarna yang telah diisi, ditandatangani dan dibubuhi meterai. (format surat pernyataan terlampir dapat diunduh di laman www.kemempora.go.id/rekrutmenpppk);
 - g. Surat Pernyataan Kemempora asli berwarna yang telah diisi, ditandatangani dan dibubuhi meterai. (format surat pernyataan terlampir dapat diunduh di laman www.kemempora.go.id/rekrutmenpppk);
 - h. Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/ Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar :
 - 1) Minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah;
 - 2) Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di instansi swasta;
 - i. Bagi penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dengan melampirkan :
 - 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) Link (tautan) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar (bagi penyandang disabilitas);
 - j. Mengunggah dokumen persyaratan khusus bagi jabatan PPPK yang disebutkan pada **romawi II huruf B dan huruf C**.
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Bagi pelamar penyandang disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada formasi umum;

5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 12 s.d 15 Januari 2023 (jadwal masih bersifat sementara, dapat berubah sesuai dengan kebijakan);
6. Pelamar yang dinyatakan lulus setelah masa sanggah akan diumumkan pada tanggal 26 s.d 28 Januari 2023 (jadwal masih bersifat sementara, dapat berubah sesuai dengan kebijakan) dan dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* meliputi :
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.
3. Nilai paling tinggi untuk Seleksi Kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. 200 (dua ratus) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk Wawancara.
4. Nilai ambang batas (nilai minimal) yang harus dipenuhi untuk Seleksi Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis, untuk jabatan sebagai berikut :
 - 1) Ahli Pertama - Analisis Kebijakan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga);
 - 2) Ahli Pertama - Analisis SDM Aparatur 248 (dua ratus empat puluh delapan);
 - 3) Ahli Pertama - Arsiparis 270 (dua ratus tujuh puluh);
 - 4) Ahli Pertama - Penerjemah 293 (dua ratus sembilan puluh tiga);
 - 5) Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 293 (dua ratus sembilan puluh tiga);
 - 6) Ahli Pertama - Perencana 293 (dua ratus sembilan puluh tiga);
 - 7) Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat 225 (dua ratus dua puluh lima);
 - 8) Ahli Pertama - Pranata Komputer 293 (dua ratus sembilan puluh tiga);
 - 9) Terampil - Arsiparis 248 (dua ratus empat puluh delapan);
 - 10) Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat 225 (dua ratus dua puluh lima);
 - 11) Terampil - Pranata Komputer 293 (dua ratus sembilan puluh tiga);
 - 12) Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur 225 (dua ratus dua puluh lima);
 - 13) Terampil - Pustakawan 225 (dua ratus dua puluh lima);

- b. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural 130 (seratus tiga puluh); dan
- c. Wawancara 24 (dua puluh empat).

VI. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) didasarkan pada nilai ambang batas (passing grade) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penilaian wawancara meliputi integritas dan moralitas.
3. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan integrasi hasil nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

VII. JADWAL SELEKSI PPPK

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman Seleksi (www.kemempora.go.id/rekrutmenpppk)	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi (https://sscasn.bkn.go.id .)	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan data final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
15	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

Catatan:

1. Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui website www.kemenpora.go.id/rekrutmenpppk atau <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Jadwal dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait status Pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan dimaksud.
3. Peserta wajib memantau informasi jadwal di website tersebut

VIII. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Panitia Seleksi Penerimaan CASN Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Penerimaan CASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan atau tanpa meminta imbalan tertentu, agar diabaikan dan tindakan tersebut adalah ilegal kejahatan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
3. Kebutuhan informasi dan laporan pengaduan berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi CASN Kementerian Pemuda dan Olahraga dilayani melalui email : sdm_aparatur@kemenpora.go.id dan nomor telepon 021-5738316 atau Whatsapp : 0812-8597-6116 maupun SSCASN Helpdesk pada laman <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/> Pelamar dapat mengakses informasi Seleksi CASN Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui akun media sosial Instagram @sdmkemenpora;
4. Peserta yang tidak hadir pada setiap tahapan seleksi dinyatakan GUGUR;
5. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

6. Apabila pelamar dikemudian hari diketahui memberikan keterangan/data/informasi yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK, dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Seluruh kegiatan penerimaan CASN diselenggarakan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Jakarta, 20 Desember 2022

Ketua Panitia Seleksi PPPK,



Dr. Gunawan Suswantoro

Lampiran I Pengumuman

Nomor : KP.01.00/12.20.22/PANSEL-CASN/XI/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

**PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA , KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PENDIDIKAN, KEPALA SUB BIDANG SARANA OLAHRAGA PENDIDIKAN
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 OLAHRAGA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG OLAHRAGA PENDIDIKAN MENENGAH, KEPALA SUB BIDANG OLAHRAGA PENDIDIKAN MENENGAH

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA , KEPALA BIDANG KEPELOPORAN TANGGAP BENCANA DAN RAWAN SOSIAL, KEPALA SUB BIDANG TANGGAP BENCANA
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN , KEPALA BIDANG ORGANISASI KEOLAHRAGAAN, KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN ORGANISASI FUNGSIONAL DAN PROFESIONAL
5	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA REKREASI , KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SANGGAR DAN PUSAT KEBUGARAN, KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN PUSAT KEBUGARAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
6	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 KEBIJAKAN PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 KEOLAHRAGAAN – S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN , KEPALA BIDANG PENINGKATAN MUTU WASIT, JURI DAN TENAGA PENDUKUNG, KEPALA SUB BIDANG PENINGKATAN MUTU WASIT DAN JURI
7	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA , KEPALA BIDANG STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN, KEPALA SUB BIDANG AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN
8	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN , KEPALA BIDANG PENINGKATAN MUTU WASIT, JURI DAN TENAGA PENDUKUNG, KEPALA SUB BIDANG PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDUKUNG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
9	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA , KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PRESTASI, KEPALA SUB BIDANG PRASARANA OLAHRAGA PRESTASI
10	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA , KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA REKREASI, KEPALA SUB BIDANG PRASARANA OLAHRAGA REKREASI
11	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 KEBIJAKAN PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA , KEPALA BIDANG KEPELOPORAN TANGGAP BENCANA DAN RAWAN SOSIAL, KEPALA SUB BIDANG RAWAN SOSIAL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
12	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PENGAWASAN KEPRAMUKAAN , KEPALA BIDANG ORGANISASI KEPELAJARAN, KEPALA SUB BIDANG EKSTRA
13	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA REKREASI , KEPALA BIDANG OLAHRAGA MASSAL DAN KESEHATAN OLAHRAGA, KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN OLAHRAGA MASSAL
14	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 KEWIRAUSAHAAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA , KEPALA BIDANG AKSES PERMODALAN, KEPALA SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN LPKP

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
15	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 KEBIJAKAN PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN – S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL – S-1 KEWIRAUSAHAAN – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA, DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA, ASISTEN DEPUTI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA, KEPALA BIDANG PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI, KEPALA SUB BIDANG PENDAMPINGAN
16	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA , KEPALA BIDANG KEPELOPORAN DESA DAN DAERAH KHUSUS, KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN DESA
17	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN , KEPALA BIDANG ORGANISASI KEOLAHRAGAAN, KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
18	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PENGAWASAN KEPRAMUKAAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN GERAKAN PRAMUKA, KEPALA SUB BIDANG KURIKULUM DAN PENDIDIKAN PRAMUKA
19	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU SOSIAL - S-1 SOSIAL	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PENGAWASAN KEPRAMUKAAN , KEPALA BIDANG ORGANISASI KEPEMUDAAN, KEPALA SUB BIDANG INTRA
20	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 KEBIJAKAN PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 KEOLAHRAGAAN – S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA REKREASI , KEPALA BIDANG OLAHRAGA MASSAL DAN KESEHATAN OLAHRAGA, KEPALA SUB BIDANG KESEHATAN OLAHRAGA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
21	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG OLAHRAGA PENDIDIKAN MENENGAH, KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN
22	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PENGAWASAN KEPRAMUKAAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN GERAKAN PRAMUKA, KEPALA SUB BIDANG PRASARANA DAN SARAN PRAMUKA
23	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 KEWIRAUSAHAAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA , KEPALA BIDANG PENELUSURAN DAN PEMETAAN POTENSI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA, KEPALA SUB BIDANG PEMETAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
24	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG OLAHRAGA PENDIDIKAN DASAR, KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN
25	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 KEBIJAKAN PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 KEOLAHRAGAAN – S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA , KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA REKREASI, KEPALA SUB BIDANG SARANA OLAHRAGA REKREASI
26	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA REKREASI , KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN RUANG PUBLIK OLAHRAGA, KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN RUANG PUBLIK OLAHRAGA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
27	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA , KEPALA BIDANG STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN, KEPALA SUB BIDANG STANDARISASI KEOLAHRAGAAN
28	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISITRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PENGAWASAN KEPRAMUKAAN , KEPALA BIDANG ORGANISASI KEPELAJARAN, KEPALA SUB BIDANG INTRA
29	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA REKREASI , KEPALA BIDANG PENGELOLAAN OLAHRAGA PETUALANGAN, TANTANGAN, DAN WISATA, KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN OLAHRAGA WISATA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
30	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 KEBIJAKAN PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA , KEPALA BIDANG KEPELOPORAN DESA DAN DAERAH KHUSUS, KEPALA SUB BIDANG DAERAH TERLUAR DAN TERTINGGAL
31	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 KEWIRAUSAHAAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA , KEPALA BIDANG PENELUSURAN DAN PEMETAAN POTENSI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA, KEPALA SUB BIDANG PENELUSURAN
32	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA REKREASI , KEPALA BIDANG PENGELOLAAN OLAHRAGA PETUALANGAN, TANTANGAN, DAN WISATA, KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN OLAHRAGA PETUALANGAN DAN TANTANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
33	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 KEWIRAUSAHAAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA , KEPALA BIDANG AKSES PERMODALAN, KEPALA SUB BIDANG FASILITASI PERMODALAN
34	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 KEBIJAKAN PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 KEOLAHRAGAAN – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 OLAHRAGA – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG OLAHRAGA PENDIDIKAN TINGGI, KEPALA SUB BIDANG KOMPETISI
35	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA , KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PRESTASI, KEPALA SUB BIDANG SARANA OLAHRAGA PRESTASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
36	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG OLAHRAGA PENDIDIKAN TINGGI, KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN
37	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN , KEPALA BIDANG PENINGKATAN MUTU PELATIH DAN INSTRUKTUR, KEPALA SUB BIDANG PENINGKATAN MUTU PELATIH
38	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 KEWIRAUSAHAAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA , KEPALA BIDANG PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI, KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
39	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 KEBIJAKAN PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 KEOLAHRAGAAN – S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA REKREASI , KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN RUANG PUBLIK OLAHRAGA, KEPALA SUB BIDANG PENGKAJIAN RUANG PUBLIK OLAHRAGA
40	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA REKREASI , KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SANGGAR DAN PUSAT KEBUGARAN, KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN SANGGAR OLAHRAGA
41	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA , KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PENDIDIKAN, KEPALA SUB BIDANG PRASARANA OLAHRAGA PENDIDIKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
42	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA , KEPALA BIDANG KADERISASI DAN PENDAYAGUNAAN KEPEMIMPINAN, KEPALA SUB BIDANG PENDAYAGUNAAN KEPEMIMPINAN
43	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG OLAHRAGA PENDIDIKAN DASAR, KEPALA SUB KOMPETISI
44	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 KEBIJAKAN PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN – S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PENGAWASAN KEPRAMUKAAN , KEPALA BIDANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN, KEPALA SUB BIDANG EKSTRA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
45	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 KEOLAHRAGAAN - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN , KEPALA BIDANG PENINGKATAN MUTU PELATIH DAN INSTRUKTUR, KEPALA SUB BIDANG PENINGKATAN MUTU INSTRUKTUR
46	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PENGAWASAN KEPRAMUKAAN , KEPALA BIDANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN, KEPALA SUB BIDANG INTRA
47	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA , KEPALA BIDANG KADERISASI DAN PENDAYAGUNAAN KEPEMIMPINAN, KEPALA SUB SUB BIDANG KADERISASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
48	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	5	2	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
49	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KEPALA SUB BAGIAN MUTASI DAN KEPANGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
50	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS - S-1 KEARSIPAN - S-1 PERKANTORAN	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM , KEPALA BAGIAN TATA USAHA, KEPALA SUB BAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP
51	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH	S-1 BAHASA INGGRIS - S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI , KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN KERJASAMA, KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
52	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 INFORMATIKA	5	8	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO KEUANGAN DAN RUMAH TANGGA , KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
53	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI , KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN PENDUKUNG
54	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI , KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEPEMUDAAN
55	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 EKONOMI – S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN – S-1 ILMU EKONOMI – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI , KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA, KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA KEOLAHRAGAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
56	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
57	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
58	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
59	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP , KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
60	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 MANAJEMEN – S-1 ILMU MANAJEMEN – S-1 EKONOMI – S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN – S-1 ILMU EKONOMI – S-1 ADMINISTRASI NEGARA – S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI , KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA, KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PENDUKUNG
61	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI - S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI
62	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI - S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
63	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI - S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI , KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN KERJASAMA, KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
64	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 JURNALISTIK - S-1 KOMUNIKASI - S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ILMU JURNALISTIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KEPALA SUB BAGIAN PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI
65	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI - S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MEDIA MASSA
66	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI - S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KEPALA SUB BAGIAN PUBLIKASI DAN PERPUSTAKAAN
67	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL – S-1 ILMU KOMUNIKASI – S-1 KOMUNIKASI – S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT – S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
68	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 KOMUNIKASI - S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI
69	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM , KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLA INFORMASI
70	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM , KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI
71	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIP - D-III KEARSIPAN - D-III PERKANTORAN	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
72	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III KOMUNIKASI - D-III ILMU KOMUNIKASI - D-III MANAJEMEN KOMUNIKASI	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MEDIA MASSA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
73	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III KOMPUTER - D-III ILMU KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI
74	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III KOMPUTER - D-III ILMU KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI
75	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI INFORMASI – D-III TEKNIK INFORMATIKA – D-III KOMPUTER – D-III ILMU KOMPUTER – D-III SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI
76	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III KOMPUTER - D-III ILMU KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI
77	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III ILMU KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM , KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUB BAGIAN SISTEM JARINGAN DAN PIRANTI KERAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
78	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - D-III ILMU MANAJEMEN	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
79	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III ILMU KEPEGAWAIAN - D-III ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - D-III ILMU MANAJEMEN	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP, KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP
80	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III ILMU KEPEGAWAIAN - D-III ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - D-III ILMU MANAJEMEN	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP, KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MPHK	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
81	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III ILMU KEPEGAWAIAN - D-III ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - D-III ILMU MANAJEMEN	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP, KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP
82	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ILMU ADMINISTRASI NEGARA – D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN – D-III MANAJEMEN – D-III ADMINISTRASI NEGARA – D-III ADMINISTRASI PUBLIK – D-III ILMU KEPEGAWAIAN – D-III ILMU ADMINISTRASI PUBLIK – D-III ILMU MANAJEMEN	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA , DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP, KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ARSIP
83	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN - D-III ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KEPALA SUB BAGIAN PUBLIKASI DAN PERPUSTAKAAN
TOTAL ALOKASI FORMASI				91	



Jakarta, 20 Desember 2022
Ketua Panitia Seleksi PPPK,

Dr. Gunawan Suswantoro

Lampiran II Pengumuman

Nomor : KP.01.00/12.20.22/PANSEL-CASN/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

CONTOH FORMAT SURAT LAMARAN

(Kota/Kabupaten), (tgl) (bln) (thn)

Kepada Yth.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
No. KTP/Identitas :
Pendidikan/Universitas :
Jabatan yang dilamar :
Unit kerja yang dilamar :
Alamat domisili :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal berlatar belakang warna merah.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (asli berwarna).
3. Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta, ditandatangani dan menggunakan meterai Rp. 10.000,- (asli berwarna).
4. Surat Pernyataan 5 (lima) poin, ditandatangani dan menggunakan meterai Rp. 10.000,- (asli berwarna).
5. Surat Pernyataan Kemenpora, ditandatangani dan menggunakan meterai Rp. 10.000,- (asli berwarna).
6. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyeteraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (asli berwarna).

7. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (asli berwarna).
8. Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar:
 - a. Minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah;
 - b. Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di instansi swasta;
9. Bagi penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dengan melampirkan*:
 - a. Dokumen/ surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - b. Tautan / link video singkat yang menyatakan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(Kota/Kabupaten), (tgl) (bln) (thn)

Hormat saya,

Meterai Rp. 10.000,-	(ttt)
-------------------------	-------

(Nama Lengkap)

Lampiran III Pengumuman

Nomor : KP.01.00/12.20.22/PANSEL-CASN/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS. PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesungguhan, dan saya bersedia dituntut dipengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

(Kota/Kabupaten), (tgl) (bln) (thn)

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 10.000,- (ttt)

(Nama Lengkap)

Lampiran IV Pengumuman

Nomor : KP.01.00/12.20.22/PANSEL-CASN/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

SURAT PERNYATAAN KEMENPORA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
No. KTP/Identitas :
Pendidikan/Universitas :
Jabatan yang dilamar :
Unit kerja yang dilamar :
Alamat domisili :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
3. Tidak terikat hubungan kerja atau ikatan dinas dengan instansi pemerintah atau badan swasta lainnya;
4. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah (PUNP);
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;
8. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan

10. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(Kota/Kabupaten), (tgl) (bln) (thn)
Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 10.000,-	(ttd)
-------------------------	-------

(Nama Lengkap)